PENGARUH KARTU PRAKERJA, BPJS KESEHATAN, DAN KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

HENDRA SAHRIAL
NIM. B1011211157

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

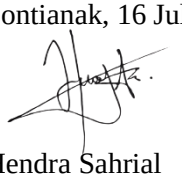
Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Hendra Sahrial
NIM	:	B1011211157
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 Juli 2025



Hendra Sahrial
NIM. B1011211157

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Hendra Sahrial
NIM	:	B1011211157
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 16 Juli 2025



Hendra Sahrial
NIM. B1011211157

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan Dan Kartu Indonesia Pintar Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

HENDRA SAHRIAL
B1011211157

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 9 Juli 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP. 19750521 2002122001	16/7/2025	
2.	Ketua Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP. 19861002 2019031004	11/Juli/2025	
3.	Anggota Penguji	Fara Dina, S.E., M.E. NIP. 19860730 2019032010	10/Juli/2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 22 JUL 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Ibanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya penulisan Tugas Akhir yang berjudul "Pengaruh Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat" dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penulisan ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu serta memberikan saran dan masukan. Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S,E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran, bimbingan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Fara Dina, S.E., M.E. selaku dosen penguji kedua yang juga telah memberikan perbaikan, arahan, saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan banyak ilmunya kepada penulis terkhusus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa/i.
9. Keluarga penulis terutama Bapak Amat Jemani dan Ibu Salina serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan hangat pendidikan pada Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Nadia Karolin Simanjuntak. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun Tugas Akhir. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan

meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan Tugas Akhir ini terselesaikan.

11. Teman Tugas Akhir (Imam, Halim, Chandra, Gusti) yang telah memberikan semangat, pengalaman, bantuan, dan pelajaran terbaik serta menghangatkan isi hati penulis.
12. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang selama masa-masa perkuliahan, semoga tulisan ini dapat memberikan semangat penulis untuk berjuang kembali melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya dan menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat bagi orang sekitar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan dapat pula dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kritik serta saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dengan tujuan tugas akhir ini menjadi tulisan yang baik.

Pontianak, 16 Juli 2025



Hendra Sahrial

NIM. B1011211157

PENGARUH KARTU PRAKERJA, BPJS KESEHATAN, DAN KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kartu Prakerja (KP), BPJS Kesehatan (BPJS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Data yang digunakan adalah data panel dengan alat analisis Eviews 12, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Prakerja, Serta Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah. Hasil estimasi menunjukan bahwa Kartu Prakerja (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), BPJS Kesehatan (BPJS) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Kartu Prakerja (KP); BPJS Kesehatan (BPJS); Kartu Indonesia Pintar (KIP).

PENGARUH KARTU PRAKERJA, BPJS KESEHATAN, DAN KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RINGKASAN

Latar Belakang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa aktif penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja (Simbolon, dkk, 2023). Menurut Puspitasari & Athaya (2025) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi menunjukkan besarnya keterlibatan masyarakat dalam dunia kerja, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan TPAK menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja, di antaranya Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar. Meskipun inisiatif tersebut telah berjalan selama beberapa tahun, dampaknya terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat masih belum sepenuhnya terlihat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur kontribusi program pemerintah terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Barat.

Kartu Prakerja berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi dampaknya terhadap partisipasi kerja masih perlu dianalisis lebih dalam. Kartu Prakerja adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja (Panjaitan, dkk, 2021). BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, namun pengaruhnya terhadap keterlibatan tenaga kerja masih belum banyak dibahas. Menurut Pritami, dkk (2023) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan lembaga yang didanai dan dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar memperluas akses pendidikan, tetapi kajian mengenai efeknya terhadap kesiapan dan partisipasi tenaga kerja belum banyak dikaji. Kartu Indonesia Pintar mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Astuti, dkk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh program-program pemerintah seperti Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pengaruh kebijakan pemerintah seperti Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap tenaga kerja. Selain Itu penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

Pertanyaaan Penelitian

1. Apakah Kartu Prakerja berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah BPJS Kesehatan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah Kartu Indonesia Pintar berpengaruhi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat?

Tujuan penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Kartu Prakerja terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh BPJS Kesehatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan melakukan regresi dan analisis untuk mengkaji pengaruh antara variabel independen seperti Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap variabel dependen, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang dianalisis mencakup informasi dari tahun 2020 sampai 2024, yang merupakan data time series, serta data cross section dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan regresi linier berganda guna mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Untuk menentukan model terbaik, digunakan tiga pendekatan regresi data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Setelah itu, dilakukan uji hipotesis untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis deskriptif menggunakan regresi linier berganda. Dalam regresi linier berganda, kita dapat mengamati pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar.

Selama periode 2020–2024, Kartu Prakerja (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. BPJS Kesehatan (BPJS) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat.

Kesimpulan

1. Kartu Prakerja (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan dan insentif yang diberikan melalui program Kartu Prakerja belum mampu mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam dunia kerja secara nyata selama periode penelitian. Meskipun program ini menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pencari kerja, dampak langsungnya terhadap partisipasi kerja masih terbatas karena berbagai faktor, seperti keterbatasan peluang kerja yang tersedia, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta hambatan non-teknis yang dihadapi peserta setelah pelatihan. Selain itu, adanya insentif selama masa pelatihan terkadang membuat peserta menunda pencarian kerja, sementara desain program yang berfokus pada pengembangan kapasitas individu tanpa penghubung yang kuat ke dunia kerja membuat peningkatan partisipasi angkatan kerja menjadi stagnan. Oleh karena itu, meskipun Kartu Prakerja merupakan langkah penting dalam pengembangan SDM, perlu adanya integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pasar kerja dan penyediaan lapangan kerja agar program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja di masa depan.
2. BPJS Kesehatan (BPJS) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang diberikan oleh program ini dapat meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan pekerja, sehingga mendorong lebih banyak individu untuk aktif mencari dan mempertahankan pekerjaan. Program jaminan kesehatan ini memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat dari risiko biaya kesehatan, sehingga menurunkan kekhawatiran terkait pembiayaan pengobatan saat menghadapi sakit atau kecelakaan kerja. Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk aktif mencari pekerjaan dan bertahan dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Selain itu, akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat melalui BPJS memungkinkan para pekerja tetap menjaga kondisi kesehatannya sehingga produktivitas kerja terjaga dan gangguan karena sakit dapat diminimalisir. Dukungan sosial dari BPJS Kesehatan ini juga memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi risiko pekerjaan, yang secara psikologis meningkatkan partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Dampak positif BPJS Kesehatan pun dirasakan pada tingkat keluarga, di mana pengurangan beban biaya kesehatan mendorong kepala keluarga untuk lebih aktif bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup.
3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini menandakan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan melalui program ini belum berdampak langsung pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam angkatan kerja. Program KIP yang idealnya ditujukan kepada siswa dari keluarga kurang mampu sekaligus yang memiliki prestasi akademik, namun pada kenyataannya peserta didik yang berprestasi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Selain itu KIP berfokus pada peningkatan kapasitas pendidikan dan pengembangan potensi sumber daya manusia secara jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap partisipasi angkatan kerja belum nyata dalam jangka pendek. Selain itu, penerima KIP umumnya masih berstatus pelajar yang belum memasuki usia produktif kerja, sehingga peningkatan partisipasi kerja melalui program ini

memerlukan waktu lebih lama untuk dapat terwujud secara signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa KIP merupakan investasi pendidikan penting yang berdampak positif pada peningkatan kualitas tenaga kerja di masa mendatang, meskipun belum secara langsung meningkatkan partisipasi angkatan kerja saat ini di Kalimantan Barat.

Rekomendasi

1. Pelatihan Kartu Prakerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja melalui kerjasama antara pemerintah, penyedia pelatihan, dan industri agar materi relevan dan meningkatkan peluang kerja peserta. Program harus didukung dengan mekanisme penyaluran kerja seperti magang dan kerja sama dengan perusahaan lokal untuk mengatasi hambatan jaringan dan pengalaman. Pendampingan setelah pelatihan penting untuk memberikan motivasi serta bimbingan agar peserta dapat segera memasuki dunia kerja atau berwirausaha, sekaligus membantu mengatasi kendala psikologis dan non-teknis yang mungkin muncul. Diversifikasi pelatihan, termasuk kewirausahaan dan soft skills, serta peninjauan insentif perlu diperkuat. Peningkatan akses dan infrastruktur digital merata di Kalimantan Barat juga prioritas agar pelatihan daring berjalan efektif. Evaluasi rutin diperlukan agar kebijakan terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
2. Pemerintah perlu memperluas cakupan peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja di sektor informal seperti pekerja harian lepas, petani, dan nelayan, yang selama ini kurang terlindungi. Dengan memperbanyak peserta, lebih banyak orang akan merasa aman ketika bekerja karena sudah terlindungi dari risiko biaya pengobatan. Kedua, kualitas dan penyebaran fasilitas kesehatan harus diperbaiki agar peserta BPJS dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan baik tanpa kesulitan, sehingga kesehatan mereka terjaga dan dapat terus bekerja dengan produktif.
3. Seleksi penerima KIP perlu lebih diperketat dan diperbaiki agar tidak hanya difokuskan pada keluarga kurang mampu, tetapi juga mengakomodasi siswa berprestasi yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri. Selain itu perlu adanya monitoring dan pendampingan yang lebih intensif agar penerima KIP dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk pendidikan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat lebih terasa. Sosialisasi program harus diperluas agar masyarakat dan keluarga penerima memahami pentingnya pemanfaatan dana KIP secara efektif dan bertanggung jawab, bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari tetapi lebih diarahkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Kemudian, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan program KIP dengan kebijakan pengembangan keterampilan dan persiapan kerja, sehingga siswa yang menyelesaikan pendidikan memiliki kesiapan lebih baik saat memasuki dunia kerja.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR iii
LEMBAR YURIDIS iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK vii
RINGKASAN viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Pengaruh Kartu Prakerja Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 7
2.2 Pengaruh BPJS Kesehatan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 7
2.3 Pengaruh Kartu Indonesia Pintar Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 8
2.4 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 8
3. METODE PENELITIAN 8
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 12
4.1 Hasil Penelitian 12
4.1.1 Uji Model 12
4.1.2 Analisis Regresi Data Panel 12
4.1.3 Analisis Regresi Data Panel Hasil Uji Hipotesis 13
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis 13
4.1.5 Koefisien Determinasi (R^2) 14
4.2 Pembahasan 14
4.2.1 Pengaruh Kartu Prakerja (KP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 14
4.2.2 Pengaruh BPJS Kesehatan (BPJS) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 15
4.2.3 Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 16
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 16
Kesimpulan 16
Rekomendasi 18

DAFTAR RUJUKAN.....19
Lampiran.....22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Barat Menurut Kab/Kota, 2020-2024 (Persen).....2
Tabel 2 Jumlah Penerima Kartu Prakerja di Kalimantan Barat Menurut Kab/Kota 2020-2024 (Jiwa) 3
Tabel 3 Penduduk yang Menjadi Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2020-2024 (Persen).....5
Tabel 4 Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar di Kalimantan Barat 2020-2024 (Jiwa).6
Tabel 5 Hasil Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier 12
Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda 12
Tabel 7 Hasil Uji t-Statistik.....13
Tabel 8 Hasil Uji F-Statistik 13
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual 8

PENGARUH KARTU PRAKERJA, BPJS KESEHATAN, DAN KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Hendra Sahrial
Universitas Tanjungpura, Indonesia
[2]Restiatun
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of the Pre-Employment Card (KP), Health Social Security Agency (BPJS), and Smart Indonesia Card (KIP) on the Labor Force Participation Rate (TPAK) using the best selected model, which is the Fixed Effect Model (FEM). The data used is panel data analyzed with Eviews 12, sourced from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik (BPS), Prakerja Statistics, and the Ministry of Primary and Secondary Education, the estimation results show that the Pre-Employment Card (KP) has no significant effect on the Labor Force Participation Rate (TPAK), the BPJS Kesehatan (BPJS) has a significant positive effect on the Labor Force Participation Rate (TPAK), and the Indonesia Smart Card (KIP) has no significant effect on the Labor Force Participation Rate (TPAK).

Keywords: *Labor Force Participation Rate (TPAK); Pre-Employment Card (KP); Health Social Security Agency (BPJS); Indonesian Smart Card (KIP).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kartu Prakerja (KP), BPJS Kesehatan (BPJS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Data yang digunakan adalah data panel dengan alat analisis Eviews 12, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Prakerja, Serta Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah. Hasil estimasi menunjukan bahwa Kartu Prakerja (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), BPJS Kesehatan (BPJS) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); Kartu Prakerja (KP); BPJS Kesehatan (BPJS); Kartu Indonesia Pintar (KIP).

[1]b1011211157@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa aktif penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja (Simbolon, dkk, 2023). Menurut Puspitasari & Athaya (2025) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi menunjukkan besarnya keterlibatan masyarakat dalam dunia kerja, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta memperkuat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan TPAK menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, meskipun laju pertumbuhannya tidak seragam di setiap kabupaten/kota. Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai perubahan ini, berikut disajikan tabel yang merangkum perkembangan TPAK di berbagai daerah dalam provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Barat Menurut Kab/Kota, 2020-2024 (Persen)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Kalimantan Barat	68,8	68,5	69,0	69,4	70,2	69,2
Sambas	74,3	72,8	74,1	72,7	72,6	73,3
Bengkayang	75,8	70,2	70,0	72,9	71,9	72,1
Landak	71,8	70,2	72,3	71,1	71,1	71,3
Mempawah	64,1	60,9	63,3	68,3	72,7	65,9
Sanggau	70,4	69,4	70,3	70,3	71,1	70,3
Ketapang	60,8	64,4	60,6	66,5	65,7	63,6
Sintang	75,6	77,8	73,1	74,1	74,5	75,0
Kapuas Hulu	74,1	72,4	77,7	72,3	75,7	74,4
Sekadau	77,5	72,0	74,3	73,8	76,1	74,7
Melawi	73,9	72,3	74,4	73,7	74,7	73,8
Kayong Utara	65,5	65,5	70,0	72,5	71,2	69,0
Kubu Raya	67,7	67,5	64,7	65,3	65,4	66,1
Kota Pontianak	60,1	61,9	64,8	63,5	64,6	63,0
Kota Singkawang	63,8	64,3	68,9	66,6	65,8	65,9

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan, dari 68,8% pada tahun 2020 menjadi 70,2% pada tahun 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data per Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sekadau, sebesar 77,5% pada tahun 2020 dan 76,1% pada tahun 2024. Sedangkan untuk yang terendah adalah Kota Pontianak yaitu sebesar 60,1% pada tahun 2020 dan 64,6% pada tahun 2024.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan kerja, di antaranya Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar. Meskipun inisiatif tersebut telah

berjalan selama beberapa tahun, dampaknya terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat masih belum sepenuhnya terlihat.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur kontribusi program pemerintah terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Barat. Kartu Prakerja berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi dampaknya terhadap partisipasi kerja masih perlu dianalisis lebih dalam. BPJS Kesehatan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, namun pengaruhnya terhadap keterlibatan tenaga kerja masih belum banyak dibahas. Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar memperluas akses pendidikan, tetapi kajian mengenai efeknya terhadap kesiapan dan partisipasi tenaga kerja belum banyak dikaji.

Kartu Prakerja adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja (Panjaitan, dkk, 2021). Program ini menyediakan akses pelatihan bagi individu yang ingin mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan keterampilan mereka, sehingga membuka peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan (Febrian & Hamim, 2024). Selain itu, Kartu Prakerja mendorong penciptaan wirausaha baru, yang berkontribusi terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Tasmilah, 2023). Di sisi lain, program ini efektif dalam mengatasi pengangguran, karena penurunan jumlah pengangguran berbanding lurus dengan meningkatnya TPAK (Rahman & Rahman, 2021).

Untuk memahami perkembangan kepemilikan Kartu Prakerja di Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat melalui data Jumlah Penerima Kartu Prakerja menurut kabupaten/kota. Data kepemilikan kartu prakerja memberikan gambaran seberapa banyaknya masyarakat berminat mengikuti program pelatihan pemerintah. Berikut disajikan tabel data masyarakat yang mengikuti program Kartu Prakerja di Provinsi Kalimantan Barat:

Tabel 2 Jumlah Penerima Kartu Prakerja di Kalimantan Barat Menurut Kab/Kota 2020-2024 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Kalimantan Barat	99.657	142.428	131.992	15.195	26.095	83.073
Sambas	7.184	24.243	61.999	3.109	9.929	21.293
Bengkayang	3.212	4.399	8.488	692	765	3.511
Landak	6.091	4.215	1.044	333	541	2.445
Mempawah	7.644	10.702	6.266	1.895	2.783	5.858
Sanggau	4.133	7.605	3.527	507	649	3.284
Ketapang	5.248	10.647	8.353	1.376	1.783	5.481
Sintang	2.288	2.385	2.013	438	807	1.586
Kapuas Hulu	946	1.258	633	204	172	643
Sekadau	1.418	2.915	1.374	249	182	1.228
Melawi	1.656	6.026	2.739	260	564	2.249
Kayong Utara	2.522	3.589	2.268	374	522	1.855
Kubu Raya	19.452	28.069	17.244	3.119	3.930	14.363
Kota Pontianak	29.652	28.252	10.018	2.020	2.483	14.485
Kota Singkawang	8.211	8.123	6.026	619	985	4.793

Sumber : Statistik Prakerja 2024

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah penerima kartu prakerja di Kalimantan Barat menunjukkan penurunan, dari dari jumlah penerima 99.657 orang pada tahun 2020 menjadi 26.095 orang pada tahun 2024. Jumlah penerima kartu prakerja tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data per Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sambas dengan rata-rata penerima 21.293 orang, Pada tahun 2020 sebanyak 7.184 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 9.929 orang. Sedangkan untuk Jumlah penerima kartu prakerja yang terendah adalah Kabupaten Kapus Hulu yaitu dengan rata-rata 643 orang, pada tahun 2020 sebanyak 946 dan pada tahun 2024 sebanyak 172 orang.

Anggaran untuk program Kartu Prakerja mengalami penurunan drastis, yang berdampak pada alokasi dana secara keseluruhan. Akibatnya, jumlah penerima manfaat program ini juga ikut berkurang secara signifikan. Penurunan ini dapat mempengaruhi efektivitas program dalam mendukung peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat (Espos.id, 2023).

Menurut Wijayanti, & Humardhiana, (2020) Pemerintah merancang program kartu Prakerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan. Program ini dihadirkan guna memperkuat kemampuan individu dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi pencari kerja. Syarat untuk mendapatkan kartu PraKerja meliputi: memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, berusia antara 18 hingga 64 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini diperuntukkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau menjalankan usaha kecil dan ingin meningkatkan keterampilan mereka (Aggraeni, dkk, 2023).

Pemerintah telah melakukan upaya dalam peningkatan kesehatan masyarakat dengan meluncurkan asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan pengobatan sehingga kesehatan masyarakat terjamin ketika sakit (Lusianti, 2017). Menurut Pritami, dkk (2023) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan lembaga yang didanai dan dibentuk oleh pemerintah untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Program BPJS Kesehatan memiliki beberapa jenis kepesertaan, yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan non-PBI. Peserta dalam kategori PBI adalah masyarakat yang tidak mampu yang menerima bantuan iuran dari pemerintah, sehingga biaya bulanan mereka ditanggung oleh negara. Orang yang tidak mampu yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini ialah masyarakat yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi tidak mampu membayar iaran. Sementara itu, peserta non-PBI Ialah masyarakat yang mampu mebayar iuran sehingga diwajibkan untuk membayar iuran bulanan secara mandiri (Taufiqul, dkk, 2017).

Masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan tentunya memiliki akses terhadap layanan kesehatan sehingga menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Kualitas kesehatan yang meningkat berdampak pada peningkatkan produktivitas, yang berkontribusi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lusianti (2017) & Indriani (2020) Pemerintah menyediakan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yang baik berdampak pada produktivitas (Cholily, 2024). Persentase kepersertaan BPJS Kesehatan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat secara umum terjadi

peningkatan hampir di semua daerah. Berikut disajikan tabel penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan:

Tabel 3 Penduduk yang Menjadi Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2020-2024 (Persen)

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Kalimantan Barat	27,5	31,2	30,9	32,4	33,6	31,1
Sambas	26,7	28,8	26,9	29,3	30,6	28,4
Bengkayang	33,5	35,4	37,6	43,3	45,1	39,0
Landak	47,3	50,3	57,5	52,3	54,1	52,3
Mempawah	40,4	45,2	46,1	51,8	53,5	47,4
Sanggau	14,5	13,4	16,0	17,6	18,7	16,1
Ketapang	20,5	17,9	17,0	22,0	23,2	20,1
Sintang	25,7	38,5	31,1	33,2	34,6	32,6
Kapuas Hulu	21,2	30,0	27,4	26,6	27,6	26,5
Sekadau	30,3	28,4	28,4	28,9	29,5	29,1
Melawi	21,3	27,5	28,4	30,5	31,9	27,9
Kayong Utara	55,7	66,9	62,3	69,9	72,2	65,4
Kubu Raya	31,3	36,3	37,3	38,3	39,4	36,5
Kota Pontianak	18,3	23,2	20,9	19,1	21,6	20,6
Kota Singkawang	33,6	38,0	39,7	40,3	41,7	38,7

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2024

Berdasarkan data pada Tabel 3, Secara umum kepesertaan BPJS kesehatan, terjadi peningkatan hampir semua daerah. Kabupaten Kayong Utara mencatat peningkatan tertinggi dari 55,7% pada tahun 2020 menjadi 72,2% pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Sanggau memiliki persentase terendah dengan hanya 14,5% pada tahun 2020 dan 18,7% pada tahun 2024.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Pintar diartikan sebagai "Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya". Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap warga Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan minat serta bakat mereka, tanpa adanya pembedaan berdasarkan status sosial, kondisi ekonomi, latar belakang budaya, agama, maupun jenis kelamin (Saraswati, 2017).

Kartu Indonesia Pintar mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Astuti, dkk, 2023). Menurut Rakhmawati & Satriawan (2019) Kartu Indonesia Pintar (KIP) menyebabkan peningkatan partisipasi sekolah, hal tersebut tentunya akan menyebabkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga peserta didik tersebut mampu bersaing pada kegiatan ekonomi setelah mereka lulus sekolah. Jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi akibat banyak siswa usia sekolah dari keluarga miskin yang belum terjangkau

Kartu Indonesia Pintar (Kompas, 2018). Berikut disajikan tabel penerima Kartu Indonesia Pintar di Kalimantan Barat:

Tabel 4 Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar di Kalimantan Barat 2020-2024 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Kalimantan Barat	357.793	357.793	369.222	364.345	357.895	367.070
Sambas	37.489	44.884	39.305	40.457	45.300	41.487
Bengkayang	25.452	25.096	29.783	28.321	28.054	27.341
Landak	50.501	45.367	47.542	31.288	43.710	43.682
Mempawah	20.182	18.347	18.837	16.972	17.429	18.353
Sanggau	24.029	32.886	30.133	44.280	30.591	32.384
Ketapang	25.902	34.126	31.707	31.212	28.180	30.225
Sintang	35.567	37.837	35.832	35.192	30.589	35.003
Kapuas Hulu	22.374	20.838	20.480	20.751	20.137	20.916
Sekadau	13.058	11.785	9.785	17.843	15.432	13.581
Melawi	13.666	16.426	16.396	19.008	17.067	16.513
Kayong Utara	11.045	10.141	10.078	8.716	9.027	9.801
Kubu Raya	40.035	40.821	39.869	35.757	34.773	38.251
Kota Pontianak	22.022	29.518	22.724	20.176	22.224	23.333
Kota Singkawang	16.471	18.023	16.751	14.372	15.382	16.200

Sumber: Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah 2024

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa peserta didik yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar di Kalimantan Barat mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 357.793 orang menjadi 357.895 orang pada tahun 2024. Penerima Kartu Indonesia Pintar tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data per Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sambas, sebanyak 37.489 orang pada tahun 2020 dan 45.300 orang pada tahun 2024. Sedangkan untuk Penerima Kartu Indonesia Pintar yang terendah adalah Kabupaten Kayong Utara yaitu sebanyak 11.045 orang pada tahun 2020 dan 9.027 orang pada tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program-program pemerintah seperti Kartu Prakerja, BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Pintar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja di Kalimantan Barat.